

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada umumnya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah namun dengan kualitas yang masih tergolong rendah tentu menjadi penghambat bagi proses pembangunan. Selain itu dengan SDM yang berkualitas akan mampu meningkatkan produktivitas serta memberikan kontribusi bagi kemajuan teknologi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolok ukur yang akan digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) (Brata, 2013).

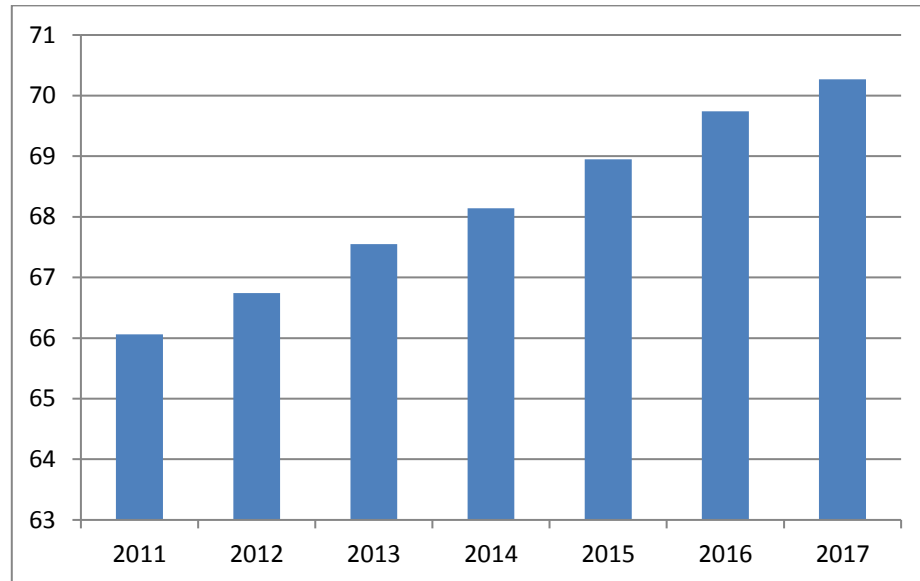
Pembangunan manusia merupakan salah satu komponen utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. maka dari itu UNDP (United Nations Development Programme) membentuk indikator yang bernama human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Secara teknis IPM memberikan ukuran gabungan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan rata rata lama sekolah penduduk dewasa. Dengan adanya IPM tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi lebih kepada manusia yang sebagai elemen. Upaya peningkatan IPM di Indonesia dilalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, dimana penyediaan dilakukan melalui mekanisme anggaran. Alokasi anggaran dan Bidang Kesehatan yang merupakan masuk didalam kategori belanja sosial (Mahardika, 2016).

Dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2013 pasal 1 ayat (1) untuk membantu daerah mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di kesehatan, sebanyak Rp3.129.900 triliun untuk dana kesehatan diseluruh Indonesia yang terdiri atas pelayanan dasar, pelayanan rujukan, dan farmasi. Pelayanan dasar dengan anggaran Rp1.251.604 triliun bagi keseluruhan di Indonesia, pelayanan rujukan dengan anggaran Rp777.611 miliar dimana dana alokasi ini akan dicairkan ke berbagai Provinsi dan Kota dengan anggaran sebesar Rp121.118.702 miliar bagi pelayanan rujukan Provinsi dan Rp656.422.289 miliar yang akan dicairkan ke Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia. Dana alokasi khusus Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Dasar, pelayanan Kesehatan Rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian (MDGs) yang akan memfokuskan guna penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak. Untuk meningkatkan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di pos kesehatan (poskades), Puskesmas, dan jaringannya, rumah sakit Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan pengolahan obat, perbekalan Kesehatan, vaskin, yang berhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) Bidang Kesehatan tahun 2014.

Dana Alokasi Pendidikan pada ayat 1 huruf A dialokasikan untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000.00 Dana Alokasi Khusus yang lebih besar dari dana alokasi khusus di bidang Pendidikan. Dana Alokasi Khusus juga di tahun 2014 dibagi atas berbagai sekolah yakni Sekolah Dasar (SD) sebesar

Rp.4.016.520.000.000.00 sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan sebesar 2.510.325.000.000.00. Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah besar karena setiap pelosok desa yang tersebar di Indonesia ada banyak sehingga jumlahnya termasuk besar dari pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk hal penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan merata diseluruh Indonesia yang diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta prabotnya bagi sekolah yang kekurangan ruang kelas dan sebagainya. Berikut dana alokasi khusus bidang pendidikan yang berada dikabupaten Bangkalan.

Pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun menurut data (BPS jawa timur, 2017) pada tahun 2016 IPM Jawa Timur mencapai angka 69,74 persen dan selanjutnya pada tahun 2017 telah mencapai angka 70,27 persen atau tumbuh 0,76 persen. Sedangkan tingkat IPM terbesar di Jawa Timur terdapat di Surabaya dengan IPM 81,07 persen sedangkan dengan IPM terendah tercatat di Sampang dengan angka 59,90 persen dan IPM pada tahun 2017 tergolong menjadi kategori tinggi yang sebelumnya berada pada kategori sedang. Terdapat tiga Kota yang mempunyai IPM ketegori sangat tinggi yaitu Kota Surabaya, Malang, dan Madiun. 16 Kabupaten dan Kota berkategori tinggi, 18 Kabupaten atau Kota yang berketegori sedang, dan hanya sampan yang memiliki IPM dengan kategori rendah.



Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur 2011-2017

Pembangunan manusia di Jawa Timur mengalami sebuah kemajuan pada periode 2011-2017. dari 66,06 (2011) meningkat menjadi 70,27 (2017) atau selama periode tersebut tumbuh menjadi 6,4 persen. Rata rata pertumbuhan selama kurun waktu 2011-2017 sebesar 1,04 persen pertahun. Upaya Pemerintah sendiri untuk meningkatkan pembangunan manusia terbilang berhasil karena prestasi itu sendiri ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jawa Timur sehingga IPM pada tahun 2017 meningkat secara signifikan yang berkategori tinggi untuk pertama kalinya,. Yang pada sebelumnya dari tahun 2010 hingga tahun 2016 masih memegang sebagai predikat IPM dengan kategori sedang.

Kualitas sumber daya manusia secara umum dapat dari Indeks Pembangunan ,Manusia (IPM) dimana Kabupaten Bangkalan pada tahun 2011 adalah sebesar 59.65 yang berada di urutan lima terbawah IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pelayanan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan, yang terdapat 68

desa yang memiliki fasilitas kesehatan dengan jarak lebih 5 km. hal ini disebabkan karena aksesibilitas yang tidak baik sehingga harus mencari jalan yang lebih jauh dan jumlah keterbatasan fasilitas kesehatan maupun pendidikan di kabupaten Bangkalan Kondisi ini juga menjadi penyebab salah satu yang menjadikan daerah tertinggal di Jawa Timur (Yennita, 2013).

Dari beberapa hal diatas yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian ini, sekaligus guna memecahkan masalah dan mengangkat judul “Pengaruh Dana Anggaran Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2011 – 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2011 - 2017

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola dan perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Untuk mengetahui peran pengaruh dana alokasi khusus bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan karya ilmiah sehingga dapat bermanfaat dalam mengembangkan diri .
3. Di pergunakan pihak pihak yang berkepentingan untuk mempergunakan konsep dan gagasan baru yang akan dihasilkan penelitian mengenai kesehatan dan Pendidikan.